Akibat Hukum Pelanggaran Asas *Pacta Sunt Servanda* oleh Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau dari Buku Ke III KUHPerdota

Adittia Karyaana*, Sri Ratna Suminar

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*karyanaadittia@gmail.com, sratnasuminar9@gmail.com

Abstract. This research identifies the problem of how the legal consequences if the buyer violates the principle of *pacta sunt servanda* in the sale and purchase agreement in terms of book III of the Civil Code. In addition, to examine how the legal protection for the seller if the buyer violates the principle of *pacta sunt servanda* in the sale and purchase agreement in terms of book III of the Civil Code JO Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The purpose of this study is to examine and find out the legal consequences if the buyer violates the *pacta sunt servanda* principle in the sale and purchase agreement and forms of legal protection for the seller if the consumer violates the *pacta sunt servanda* principle which is based on the provisions of the Civil Code and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The method used in this research is a normative juridical approach through the use of secondary data. The normative approach is based on the use of statutory regulations as secondary data based on primary law as a primer material legal, and the other datas from secondary and tertiary legal materials. The results of the research is the legal consequences for buyers who violate the application of the principle of *pacta sunt servanda* is the need to provide compensation as stipulated in Article 1246 of the Civil Code. The legal protection of the seller in the sale and purchase agreement is guaranteed by the provisions of Article 1338 which contains the principle of *pacta sunt servanda* and is supported by the provisions of Article 6 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Keywords: *The Principle of Pacta Sunt Servanda, Sale and Purchase Agreement, Legal Protection.*

Abstrak. Penelitian mengidentifikasi permasalahan tentang bagaimana akibat hukum apabila pembeli melanggar asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian jual beli ditinjau dari buku III KUHPerdota. Selain itu juga untuk meneliti tentang bagaimana perlindungan hukum bagi penjual apabila pembeli melanggar asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian jual beli ditinjau dari buku III KUHPerdota JO Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan penelitian ini guna mengkaji dan mengetahui akibat hukum apabila pembeli melanggar asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian jual beli dan bentuk perlindungan hukum terhadap penjual apabila konsumen melanggar asas *pacta sunt servanda* yang didasarkan pada ketentuan KUHPerdota dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif melalui penggunaan data sekunder. Pendekatan normatif didasarkan kepada penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai data sekunder berbahan hukum primer. Data sekunder lainnya diperoleh melalui pengumpulan bahan hukum sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian akibat hukum terhadap pembeli yang melanggar penerapan asas *pacta sunt servanda* adalah perlunya memberikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdota. Adapun perlindungan hukum terhadap penjual sebagai pelaku usaha dalam perjanjian jual beli dijamin oleh ketentuan Pasal 1338 yang mengandung asas *pacta sunt servanda* serta didukung melalui ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: *Asas Pacta Sunt Servanda, Perjanjian Jual Beli, Perlindungan Hukum.*

A. Pendahuluan

Perjanjian jual beli merupakan salah satu perjanjian yang lazim terjadi di masyarakat. Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya yaitu antara penjual dan pembeli. Perjanjian mendasari lahirnya hak dan kewajiban di antara para pihak yang melaksanakan suatu perjanjian. Umumnya pada suatu perjanjian terjadi dengan adanya sepakat atau consensus dari kedua belah pihak dan mengikat mereka yang membuatnya, seperti mengikatnya suatu undang-undang. Salah satu unsur dalam keberlangsungan perjanjian jual-beli yaitu hadirnya suatu kontrak yang diperjanjikan. Isi kontrak tersebut secara umum dapat disusun sepihak oleh pelaku usaha saja atau disusun berdasarkan kesepakatan antara pelaku usaha dengan konsumen, atau menggunakan sistem perjanjian baku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Carne.id dalam pelaksanaan perjanjian jual beli menerapkan klausula baku. Apabila konsumen menyetujui isi klausula tersebut maka perjanjian jual beli dapat terjadi secara konsensual. Namun jika konsumen merasa ketentuan klausula yang ditawarkan oleh Carne.id tidak sesuai, maka perjanjian jual beli tidak terjadi. Pada kondisi perjanjian jual beli disetujui oleh kedua belah pihak, maka perjanjian jual beli berlangsung dan secara otomatis isi perjanjian tersebut mengikat kedua pihak. Akibat dari terjadinya perjanjian jual beli tersebut menyebabkan timbulnya prestasi untuk dipenuhi oleh konsumen dan penjual sebagaimana isi perjanjian.

Namun dalam pelaksanaan perjanjian jual beli, penerapan mengikatnya suatu kontrak atau asas *pacta sunt servanda* tersebut seringkali dilanggar baik oleh pihak pelaku usaha itu sendiri maupun oleh konsumen. Hal tersebut dapat menyebabkan dialaminya kerugian terhadap pihak yang tidak mendapatkan haknya sebagaimana isi klausula yang disepakati. Hal tersebut sebagaimana yang dialami oleh Carne.id selaku penjual yang disebabkan oleh keterlambatan pelunasan pembayaran oleh konsumen padahal pihak penjual telah selesai melakukan pengiriman. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian hukum terhadap permasalahan perjanjian jual-beli antara Carne.id dan konsumen tersebut apakah dalam pelaksanaannya betul terjadi tidak terpenuhinya prestasi atas perjanjian yang telah mengikat satu sama lain, sehingga atas wanprestasi tersebut konsumen dapat dikenakan akibat hukum seperti dituntut melakukan ganti kerugian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menetapkan beberapa masalah untuk diidentifikasi yaitu: Bagaimana akibat hukum apabila pembeli melanggar asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian jual beli ditinjau dari buku III KUHPerdato?. Serta bagaimana perlindungan hukum bagi penjual apabila pembeli melanggar asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian jual beli ditinjau dari buku III KUHPerdato jo. Undang-Undang Perlindungan Konsumen?. Berkaitan dengan identifikasi masalah tersebut, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diketuinya akibat hukum apabila pembeli melanggar asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian jual beli ditinjau dari buku III KUHPerdato.
2. Diketuinya perlindungan hukum bagi penjual apabila pembeli melanggar asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian jual beli ditinjau dari buku III KUHPerdato jo. Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian disusun dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dianalisis secara deskriptif analitis. Penggunaan pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk menemukan ketentuan hukum yang mendasari pembahasan masalah yang diidentifikasi. Temuan tersebut kemudian dianalisis dan dituangkan secara deskriptif sehingga dapat melahirkan suatu kesimpulan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang teknik pengumpulan data tersebut dilaksanakan melalui studi pustaka dan wawancara. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Akibat Hukum Terhadap Konsumen Atas Pelanggaran Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Perjanjian Jual Beli

Secara esensial asas *pacta sunt servanda* menjadi landasan daya mengikatnya perjanjian. Pada istilah lain asas *pacta sunt servanda* seringkali dimaknai sebagai *sancity of contract* (kesucian kontrak). Asas *pacta sunt servanda* ini menimbulkan tanggungjawab untuk melakukan atau memenuhi sesuatu kepada setiap pihak dalam perjanjian. Secara sederhana pada pelaksanaan jual beli, artinya baik penjual maupun pembeli harus memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Pembeli membayarkan sejumlah harga atas barang/jasa yang hendak dibeli atau digunakannya, sedangkan penjual memberikan barang/jasa yang sesuai dengan yang dipesan oleh konsumen.

Secara yuridis kehadiran asas *pacta sunt servanda* ini terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak di dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan tinjauan perikatan Indonesia, asas *pacta sunt servanda* ini menjadi konsekuensi logis dari eksistensi Pasal 1233 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa setiap perikatan dapat lahir dari undang-undang maupun karena perjanjian.

Berdasarkan ketentuan hukumnya tersebut, sehingga menimbulkan konsekuensi bahwa pada dasarnya dalam suatu perjanjian yang dibuat dan memenuhi aspek konsensualismenya akan dilaksanakan sebagaimana yang disepakati dengan situasi sedikit “memaksa” untuk dipatuhi sebagaimana memaksanya aturan perundnag-undangan. Maka adapun terhadap perjanjian jual beli yang pada dasarnya merupakan perjanjian yang dibuat atau terjadi secara sengaja atas kehendak penjual dan pembeli, berakibat harus dijalankan oleh kedua belah pihak dengan sungguh-sungguh sebagaimana perjanjian yang disepakati.

Kehadiran asas *pacta sunt servanda* dalam suatu perjanjian, memberikan penekanan bahwa kedua belah pihak memiliki hubungan keterikatan dengan isi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati. Keterkaitan tersebut berlaku terhadap isi perjanjian baik yang disusun secara bersama melibatkan kedua belah pihak maupun terhadap isi perjanjian yang ditentukan oleh satu pihak saja misalnya hanya oleh penjual. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada hakikatnya dalam penerapan asas *pacta sunt servanda*, kedua pihak baik pihak penjual maupun pembeli terikat kepada isi perjanjian tersebut, bukan kepada pihak lain. Sehingga keterikatan antar pihak bukan karena ia menghendaki tetapi karena ia memberikan janjinya.

Kepentingan pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian Ketika berlangsungnya perjanjian menjadi tertutupi oleh kepatuhan terhadap isi perjanjian yang mengikat. Namun demikian meskipun dalam pelaksanaannya asas *pacta sunt servanda* berkaitan erat dengan penerapan asas iktikad baik dalam membuat, menjalankan dan mengakhiri perjanjian, akan tetapi mungkin saja dalam pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak dilaksanakan dengan sempurna atau tidak dilaksanakan sama sekali. Berdasarkan kondisi tersebut, pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya yang diakomodir oleh hukum, dimana tindakan yang paling drastis karena tidak melakukan pemenuhan perjanjian tersebut adalah dengan melakukan pembatalan perjanjian atau dalam keadaan lain dapat dibatalkan demi hukum.

Asas *pacta sunt servanda* ditinjau berdasarkan fungsinya tidak hanya sebagai persoalan moral dalam perjanjian, akan tetapi persoalan hukum yang akan terjadi jika prestasi suatu perjanjian tidak dapat dicapai oleh salah satu pihak. Bahkan apabila dalam hal dibawa kepada ranah pengadilan, hakim tidak dapat mengintervensi isi perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Maka, kekuatan utama dalam isi perjanjian adalah para pihak itu sendiri sebagai pembuat hukum.

Perkembangan asas *pacta sunt servanda* bukanlah asas yang bisa berdiri sendiri, karena dalam fase pelaksanaan perjanjian, kemungkinan-kemungkinan akan adanya kendala-kendala yang akan dihadapi oleh parah pihak atau salah satu pihak besar kemungkinan akan terjadi. Kendala itu bisa terjadi karena di luar kehendak para pihak, seperti terjadinya suatu perubahan fundamental yang menjadi dasar perjanjian dibuat, sehingga perjanjian itu menjadi tidak relevan lagi untuk dilakukan atau dalam pelaksanaan perjanjian, prestasi yang menjadi objek

dalam perjanjian bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum ataupun kesusilaan. Maka dapat disimpulkan bahwa ada asas-asas lain yang harus diperhatikan saat melaksanakan perjanjian seperti penerapan asas iktikad baik.

Asas *pacta sunt servanda* atau mengikatnya suatu perjanjian selayaknya undang-undang lahir dari asumsi bahwa perjanjian secara alamiah mengikat dilandasi dua faktor. Pertama, diyakini bahwa sifat kesederhanaan seseorang menghendaki terjaidnya kerjasama dan berinteraksi dengan orang lain, sehingga orang-orang harus saling mempercayai yang pada akhirnya (janji itu mengikat). Faktor kedua ialah bahwa setiap individu memiliki hak, yang mana hak paling mendasar adalah hak milik yang dapat dialihkan.

Sedangkan dalam tinjauan yuridis urgensi penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian ditimbulkan oleh adanya ketentuan mengenai asas tersebut dalam ketentuan KUHPerdota. Seperti terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Ketentuan Pasal 1338 tersebut mencerminkan kondisi yang mana terhadap pihak-pihak yang telah melaksanakan suatu perjanjian secara tertulis atau atas klausul yang telah dibuat di dalam perjanjian tertulis tersebut.

Berkaitan dengan timbulnya kewajiban, hak dan tanggungjawab akibat dari penerapan asas *pacta sunt servanda*, Adapun pertanggung jawaban para pihak dalam perjanjian yang telah disepakati tersebut mencakup pemenuhan hak dan kewajiban para pihak yang telah dimuat di dalam isi perjanjian. Adapun dalam pelaksanaannya, penerapan asas *pacta sunt servanda* dapat mulai terjadi apabila telah terjadi kesepakatan dan pemenuhan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata.

Asas *pacta sunt servanda* dalam penerapannya dalam perjanjian jual beli, dinilai berfungsi untuk memperlancar berlangsungnya perjanjian tanpa adanya suatu problematika bahkan dinilai sebagai upaya untuk menghindari terjadinya gugat menggugat ke pengadilan. Sehingga adapun dalam hal terjadinya permasalahan dapat diupayakan penyelesaian dalam jalur non litigasi atau di luar pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, maka asas *pacta sunt servanda* menjadi salah satu asas dalam perjanjian yang bertujuan untuk menimbulkan suatu kepastian hukum bagi para pihak atas terlaksananya klausul perjanjian yang telah disepakati bersama untuk dapat dilaksanakan dengan jujur oleh para pihak sehingga pelaksanaan perjanjian tersebut dapat berjalan secara baik dan lancar dan tidak mengalami wanprestasi atau ingkar janji.

Berdasarkan tujuan dan fungsi penerapan asas *pacta sunt servanda* yang mana memberikan perlindungan hukum secara otomatis ketika perjanjian disepakati oleh para pihak. Hal tersebut dapat menyebabkan tercapainya rasa aman terhadap perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Tingkat kelengkapan perjanjian dalam klausula menentukan kekuatan perlindungan hukum bagi para pihak. Perlindungan hak dan kewajiban yang didapat dari asas *pacta sunt servanda* adalah hak mutlak bagi para pihak pelaku perjanjian. Para pihak wajib mendapatkan haknya ketika apa yang diperjanjikan telah sampai pada ketentuan yang diperjanjikan.

Sebagaimana telah disebutkan, bahwa dalam perjanjian jual beli terdapat dua pihak yang saling terikat. Pihak pertama adalah penjual selaku pihak yang menyediakan atau menawarkan produk/barang atau jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Sedangkan pihak lainnya merupakan pembeli yang dalam jual beli diharuskan membayar sesuatu yang menjadi objek dalam jual beli sehingga mendapatkan hak atas kepemilikan objek tersebut. Berkaitan dengan hadirnya perjanjian dalam jual beli, sehingga dalam perspektif hukum perdata mengenai perjanjian jual beli diatur dalam KUHPerdota yaitu dimulai dari Pasal 1457 hingga Pasal 1540.

Sebagai perjanjian yang sangat lazim ditemukan dalam masyarakat, kedudukan perjanjian jual beli tentu saja dalam pelaksanaannya harus berlandaskan kepada ketentuan KUHPerdota. Hal paling dasar dalam pelaksanaan perjanjian jual beli adalah terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana amanat ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota. Empat unsur yang termasuk ke dalam syarat sah perjanjian yaitu meliputi adanya kesepakatan, adanya kecakapan dalam membuat perjanjian, terdapat suatu hal tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu sebab yang halal.

Berkaitan dengan syarat sah perjanjian tersebut, dalam ketentuan Pasal yang mengatur perjanjian jual beli terdapat hubungan yang erat. Seperti dalam syarat sah perjanjian pertama yaitu dikatakan suatu perjanjian terjadi apabila timbul kesepakatan yang mengikat. Ketentuan

tersebut sejalan dengan isi Pasal 1458 KUHPerdara mengenai perjanjian jual beli yang mana menjelaskan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Berdasarkan kandungan dua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang konsensualis atau dalam kata lain perjanjian yang berlandaskan kepada asas konsensualisme. Asas tersebut melandasi penjelasan bahwa suatu perjanjian jual beli dapat terjadi setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu sepakatnya penjual dan pembeli. Kesepakatan tersebut di dalamnya dapat mengandung objek apa yang diperjanjikan, berapa harganya, kapan harus dibayarkan dan kapan objek perjanjian tersebut harus dikirimkan oleh penjual.

Perjanjian jual beli tersebut juga dapat dilangsungkan apabila terdapat perjanjian atau klausula yang menjadi objek kesepakatan. Perjanjian tersebut secara umum dapat dibuat secara bersama oleh penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan, maupun dibentuk terlebih dahulu menjadi suatu perjanjian baku yang isi klausulanya ditentukan secara sepihak oleh penjual tanpa adanya proses negoisasi dengan pembeli. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh ahli bahwa perjanjian baku merupakan suatu perjanjian yang menjadi tolak ukur, patokan atau pedoman terhadap setiap konsumen dalam mengadakan hubungan hukum dengan pelaku usaha yang sebelumnya telah distandarisasikan atau dibakukan.

Adapun dalam pembentukan suatu klausula baku dalam tinjauan KUHPerdara dilandasi oleh hadirnya asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian. Asas kebebasan berkontrak tersebut disebutkan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (2) yang secara umum menjelaskan bahwa isi perjanjian dapat ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha atau penjual dengan batasan tertentu. Batasan yang dimaksud adalah tidak diperbolehkan melanggar ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

Berdasarkan unsur-unsur hukum yang terkandung dalam perjanjian jual beli tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadinya perjanjian jual beli adalah ketika terjadinya suatu kesepakatan antara pelaku usaha selaku penjual dan pembeli selaku konsumen yang mana disepakatinya isi perjanjian baik yang berbentuk klausula baku atau berdasarkan kesepakatan yang dinegoisasikan bersama. Sehingga dapat disebutkan bahwa dalam suatu perjanjian jual beli, maupun perjanjian pada umumnya pemenuhan syarat sah perjanjian dan penerapan asas-asas perjanjian menjadi landasan fundamental dalam pelaksanaan perjanjian jual beli.

Adapun pada saat suatu perjanjian jual beli telah terjadi antara pelaku usaha dan konsumen yang saling bersepakat. Hal tersebut menimbulkan adanya konsekuensi hukum lahirnya hak dan kewajiban terhadap masing-masing pihak. Hak dan kewajiban tersebut secara umum sebagaimana isi dari perjanjian yang telah disepakati. Namun secara yuridis, hukum nasional Indonesia juga memiliki aturan tertentu tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Namun pada dasarnya yang termasuk ke dalam kewajiban penjual adalah menyediakan objek yang diperjanjikan dalam jual beli sesuai dengan ketentuan yang disepakati dan mengirimkannya atau memberikannya kepada konsumen tepat waktu. Sebaliknya juga terhadap konsumen yang mana sebagai pembeli berkewajiban membayar sejumlah nilai yang telah disepakati kepada penjual pada waktu yang juga telah disepakati sehingga jual beli kemudian dapat dilanjutkan, apabila objek perjanjian telah diterima konsumen maka terjadilah alih hak kepemilikan menjadi milik konsumen.

Selanjutnya dalam suatu perjanjian jual beli yang terjadi, sejak kata sepakat dinyatakan baik secara tertulis maupun secara lisan oleh kedua pihak maka secara otomatis isi perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak. Mengikatnya kedudukan perjanjian tersebut bertujuan untuk menuntut dilakukannya itikad baik dari kedua belah pihak agar memenuhi isi perjanjian yang disepakati, isi perjanjian tersebut dalam istilah keperdataan disebut sebagai prestasi. Selain menuntut dilaksanakannya perjanjian jual beli dengan itikad baik, mengikatnya suatu perjanjian juga dilatarbelakangi oleh sifat perjanjian yang mengikat layaknya suatu perundang-undangan. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi pentingnya untuk memenuhi dan menjalankan prestasi

dengan baik dan sungguh-sungguh.

Mengenai mengikatnya suatu perjanjian tersebut sebagaimana telah dijelaskan sebagai asas *pacta sunt servanda* yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Meskipun perjanjian yang dipergunakan merupakan hasil dari penyusunan secara sepihak pelaku usaha seperti pada klausula baku, akan tetapi asas ini tetap berlaku mengikatnya perundang-undangan. Manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan asas *pacta sunt servanda* ini adalah memaksa kedua belah pihak yang bersepakat untuk memenuhi prestasinya, atau dalam kata lain berupaya untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam isi perjanjian. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian jual secara langsung berlaku sejak terjadinya kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen.

Namun dalam realitasnya penerapan asas *pacta sunt servanda* meskipun secara jelas melandasi hukum mengikatnya perjanjian sebagaimana perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari permasalahan. Utamanya permasalahan dalam perjanjian jual beli adalah ditemukannya salah satu pihak maupun kedua belah pihak yang tidak melaksanakan perjanjian dengan itikad baik sebagaimana pemenuhan prestasi yang seharusnya.

Salah satunya seperti dalam pelaksanaan perjanjian jual beli daging antara Carne.id dengan seorang konsumen. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan jual beli daging yang dilakukan oleh Carne.id, digunakan sistem perjanjian baku. Sehingga terhadap konsumen yang hendak membeli daging pada Carne.id diharuskan menyetujui isi klausula baku tersebut baru kemudian jual beli dapat dilakukan.

Berdasarkan aturan tersebut maka konsumen tersebut kemudian menyetujui klausula yang diajukan oleh pihak Carne.id selaku penjual. Sejak konsumen tersebut menyebutkan persetujuan terhadap klausula baku yang diajukan Carne.id, maka perjanjian jual beli telah terjadi berdasarkan asas konsensualisme. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap kedua belah pihak saling terikat kepada isi perjanjian. Maka sesuai dengan isi klausula baku, konsumen kemudian memesan sejumlah daging secara *preorder* dan disusul dengan membayarkan uang muka sesuai isi kesepakatan dalam klausula.

Sampai pada tahap tersebut, konsumen menunjukkan itikad baiknya untuk patuh untuk memenuhi prestasi sesuai kesepakatan. Selanjutnya dua hari kemudian pihak Carne.id sesuai dengan waktu yang disepakati sebagai hari pengiriman daging, melakukan pengiriman melalui driver ojek online. Pengiriman tersebut berhasil dilaksanakan hingga daging diterima dengan baik oleh salah satu pihak dari konsumen. Maka hingga tahap ini kedua belah pihak berupaya beritikad baik untuk memenuhi prestasi berdasarkan isi perjanjian.

Namun kemudian setelah dilaksanakan pengiriman daging oleh pihak Carne.id, pada klausula disebutkan bahwa pihak konsumen harus segera melakukan pelunasan sebanyak sisa pembayaran uang muka sebelumnya dengan waktu paling terlambat adalah satu jam setelah pengiriman. Akan tetapi sejak pengiriman selesai dilaksanakan hingga satu jam kemudian, tidak ditemukan upaya pelunasan dari pihak konsumen. Tidak adanya upaya pelunasan dari pihak konsumen tersebut berlanjut hingga satu hari setelah pesanan dikirimkan. Tidak hanya sampai di satu hari setelah pengiriman tersebut, hari kedua setelah pengiriman pun pelunasan belum juga dipenuhi oleh konsumen. Upaya yang dilakukan Carne.id adalah menuntut haknya untuk mendapatkan uang pelunasan dengan secara intensif menghubungi pihak konsumen untuk mengkonfirmasi mengapa pelunasan belum juga dilakukan. Setelah dua hari berlalu tersebutpun dan ketika pihak konsumen sudah dapat dihubungi, status pelunasan tersebut juga masih belum dapat dikonfirmasi karena staf yang berwenang sedang berada di luar kota.

Karena dinilai telah melalaikan isi perjanjian yang telah disepakati, maka pihak Carne.id pada hari ketiga setelah pengiriman daging menghubungi kembali pihak konsumen dengan menyebutkan bahwa pihak Carne.id dapat mengirimkan somasi apabila pelunasan masih juga belum dipenuhi. Somasi yang hendak dikirimkan oleh pihak Carne.id adalah teguran mengenai pelunasan yang tidak kunjung dipenuhi oleh pihak konsumen, yang dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tersebut melenceng dari isi perjanjian.

Selain itu juga akibat keterlambatannya pihak Carne.id menyatakan bahwa terdapat kerugian dari kelalaian konsumen tersebut untuk melunasi pembayaran. Kerugian tersebut

adalah jangankan mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli tersebut, modal yang digunakan untuk daging yang dikirimkan saja belum tertutupi. Selain itu juga menghambat *cashflow* Carne.id, padahal apabila pelunasan dilakukan tepat waktu biaya tersebut dapat diputar kembali untuk menjadi modal dan memenuhi permintaan pesanan daging dari konsumen lain. Berdasarkan hal tersebut pihak Carne.id menuntut pembayaran tambahan sebesar 10% kepada konsumen tersebut atas tidak kunjung dibayarkannya pelunasan pemesanan daging.

Berdasarkan permasalahan tersebut dapat ditinjau bahwa sejak saat pihak Carne.id memberikan isi perjanjian baku yang berlaku terhadap seluruh konsumen dan konsumen tersebut menyetujui isi perjanjian tersebut maka perjanjian telah secara konsensualis terjadi. Namun pada pelaksanaan perjanjian jual beli tersebut ditemukan terjadinya kelalaian konsumen yang mana dapat dilihat sebagai tidak terpenuhinya prestasi. Pelunasan yang seharusnya dilaksanakan satu jam setelah pengiriman, baru dilakukan setelah teguran diberikan dan melewati batas waktu tiga hari. Hal tersebut tidak sesuai dengan poin ke-tiga isi perjanjian baku.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian maka isi perjanjian tersebut mengikat kepada kedua pihak untuk sama-sama beritikad baik memenuhi prestasi masing-masing. Namun dalam hal ini pihak konsumen dianggap tidak memenuhi prestasi yang seharusnya. Keadaan tidak terpenuhinya prestasi ini merupakan bentuk dari terjadinya wanprestasi melalui pelanggaran terhadap asas *pacta sunt servanda*. Bahwa apabila pelaksanaan perjanjian dilandasi asas tersebut, maka kedua belah pihak tidak akan ada yang merasa dirugikan sebab telah memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana yang disepakati. Akan tetapi dalam pelaksanaannya konsumen justru tidak memenuhi salah satu isi perjanjian tersebut.

Asas *pacta sunt servanda* melandasi mengikatnya suatu perjanjian sebagaimana mengikatnya perundang-undangan, sejalan dengan pengertian tersebut bahwa seharusnya perjanjian jual beli antara Carne.id dengan konsumen tersebut dipenuhi dengan baik oleh masing-masing pihak. Namun karena pihak konsumen tidak kunjung membayarkan pelunasan sebagaimana prestasi seharusnya maka telah terjadi pelanggaran terhadap asas *pacta sunt servanda*, bahwa isi perjanjian tidak dipenuhi padahal asas ini menuntut kedua belah pihak melaksanakan perjanjian dengan itikad baik.

Pelanggaran terhadap asas *pacta sunt servanda* oleh pihak konsumen dalam perjanjian jual beli ini berakibat pada kerugian yang diterima oleh pihak Carne.id selaku penjual. Maka berdasarkan hal tersebut menimbulkan adanya akibat hukum kepada konsumen yang melanggar asas *pacta sunt servanda*. Akibat hukum tersebut salah satunya adalah pihak konsumen sebagai pihak yang melanggar dapat dituntut untuk membayarkan ganti kerugian.

Kerugian yang bisa dimintakan gantinya, tidak hanya mencakup biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang, tetapi juga berupa kehilangan keuntungan yaitu keuntungan yang didapat seandainya siberhutang tidak lalai. Bahwa kerugian yang harus diganti meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi, artinya ada hubungan sebab-akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang diderita.

Hal tersebut sebagaimana disebutkan oleh ahli bahwa secara umum, akibat hukum yang dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi adalah membayar kerugian yang diderita atau membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian, peralihan risiko atau berakibat terhadap harus membayar biaya perkara apabila proses berlanjut hingga diperkarakan di depan hakim.

Namun dalam hal ini karena pihak konsumen setuju untuk membayar ganti rugi yang telah ditentukan, maka penyelesaian pelanggaran asas *pacta sunt servanda* tersebut tidak dilaksanakan melalui jalur litigasi atau pengadilan. Melainkan diselesaikan secara musyawarah mufakat yaitu dengan membayarkan ganti rugi nominal sejumlah uang yang harus dilunasi ditambah biaya ganti rugi sebesar 10% dari total pembayaran. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut adapun akibat hukum terhadap konsumen yang melanggar asas *pacta sunt servanda* dalam suatu perjanjian jual beli dapat dituntut untuk membayarkan ganti kerugian.

Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Atas Terjadinya Pelanggaran Asas *Pacta Sunt Servanda* Berdasarkan Buku III KUHPerdara

Seringkali disebutkan bahwa dalam perjanjian jual beli, posisi konsumen adalah menempati posisi yang lemah sehingga harus diberikan perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian. Hal tersebut baik dikarenakan beberapa faktor, seperti posisinya yang tidak bisa bernegosiasi terhadap perjanjian pelaku usaha yang telah dibakukan dan disusun secara sepihak. Maupun faktor lainnya seperti rentan terkena resiko menerima produk, barang/jasa yang tidak sesuai kesepakatan hingga rentan resiko menjadi korban penipuan jual beli.

Hal tersebut melatarbelakangi munculnya suatu hukum perlindungan konsumen yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap upaya perlindungan hukum konsumen. Sejalan dengan hal tersebut konsiderasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa salah satu tujuan ditetapkannya undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Namun dalam realitas di masyarakat sebagai perjanjian yang lazim banyak terjadi, dalam perjanjian jual beli dewasa ini tidak hanya perlindungan hukum terhadap konsumen saja yang harus diberikan jaminan. Akan tetapi begitu juga terhadap pelaku usaha selaku penjual. Urgensi perlindungan hukum terhadap pelaku usaha tersebut dilatarbelakangi oleh penerapan asas *pacta sunt servanda* yang mana menyebabkan terjadinya keseimbangan posisi antara konsumen selaku pembeli dan pelaku usaha sebagai penjual dalam suatu perjanjian. Keseimbangan tersebut terjadi karena kedua belah pihak sama-sama terikat kepada isi perjanjian, sehingga keduanya dituntut untuk dapat memenuhi prestasi yang tercantum dalam perjanjian yang telah disepakati. Hal tersebut adalah makna dari asas *pacta sunt servanda* sebagai asas mengikatnya suatu perjanjian.

Kondisi tersebut didasarkan pada ketentuan mengenai asas *pacta sunt servanda* yang disebutkan dalam KUHPerdara Pasal 1338. Pada ayat (1) pasal tersebut disebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan ayat (3) menyebutkan bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Apabila ditinjau berdasarkan kandungan pasal tersebut menegaskan bahwa perjanjian jual belipun dalam pelaksanaannya memiliki konsekuensi hukum untuk dipatuhi melalui itikad baik oleh seluruh pihak yang bersepakat. Termasuk dalam hal apabila hendak membatalkan perjanjian, kesepakatan kedua pihak juga merupakan hal yang penting. Hal tersebut menggambarkan adanya keseimbangan posisi antara pelaku usaha atau penjual dengan konsumen atau pembeli dalam perjanjian jual beli.

Berkaitan dengan hal tersebut, secara umum perlindungan hukum terhadap pelaku usaha memang salah satunya diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tepatnya pada Pasal 6 dan Pasal 7 tentang hak dan kewajiban bagi pelaku usaha. Pasal tersebut melandasi hak pelaku usaha untuk berhak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, berhak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, berhak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, berhak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Akan tetapi undang-undang tersebut tidak memberikan kekuatan hukum dan perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak dan kewajiban terhadap pelaku usaha tersebut untuk melakukan sesuatu seperti mengajukan gugatan dan lainnya. Maka diperlukan landasan hukum yang dapat menjadi pegangan pelaku usaha untuk dapat mempertahankan posisinya ketika dalam posisi dirugikan.

Keberadaan asas *pacta sunt servanda* ini kemudian menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan perjanjian jual beli. Hal tersebut dikarenakan pemberian posisi yang seimbang terhadap kedua pihak dengan terikatnya kepada isi perjanjian akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak atas terlaksananya klausul perjanjian yang telah disepakati bersama untuk dapat dilaksanakan dengan jujur oleh para pihak sehingga pelaksanaan perjanjian tersebut dapat berjalan secara baik dan lancar dan tidak mengalami wanprestasi atau ingkar janji. Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh KUHPerdara melalui ketentuan pasal tentang asas *pacta sunt servanda* terhadap pelaku usaha.

Bahkan lebih jauh lagi diakibatkan penerapan asas *pacta sunt servanda* dikatakan bahwa hakimpun tidak dapat ikut campur dalam pelaksanaan perjanjian jual beli. Karena isi perjanjian dan pelaksanaannya menjadi mutlak hanya berhubungan dengan pelaku usaha dan konsumen yang saling bersepakat. Atau dalam kata lain menjadi landasan bahwa baik hakim maupun pihak ketiga lain mesti menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.

Adapun dalam upaya penyelesaiannya apabila terjadi pelanggaran terhadap asas *pacta sunt servanda*, maka pihak lainnya yang merasa dirugikan karena ketidak patuhan tersebut dapat menuntut ganti rugi atas wanprestasi. Ganti kerugian akibat suatu wanprestasi seperti pada pelanggaran asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian dapat didasarkan kepada ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara yang mana menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi dapat dituntut jika telah dilakukan somasi (*in gebreke stelling*) oleh pihak pelaku usaha.

Berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdara disebutkan bahwa ganti rugi meliputi biaya, ganti rugi, dan bunga yang boleh dituntut kreditur terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut dibawah ini. Berdasarkan isi ketentuan Pasal 1246 tersebut penghitungan ganti rugi harus dapat diatur berdasarkan jenis dan jumlahnya secara rinci seperti kerugian kreditur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian tersebut dipenuhi dan ganti rugi bunga (*interest*), maka ganti kerugian yang diterima oleh pihak yang dirugikan.

Berdasarkan hal tersebut adapun dalam kaitannya dengan permasalahan pelanggaran asas *pacta sunt servanda* oleh konsumen dalam perjanjian jual beli dengan Carney.id. Ganti kerugian didasarkan kepada hasil perhitungan yang telah dibakukan secara sepihak oleh penjual yang kemudian juga telah diinformasikan pada saat konsumen belum menyatakan sepakat. Maka jumlah biaya ganti rugi tersebut juga turut disepakati oleh konsumen pada saat menyetujui klausula baku.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Akibat hukum terhadap pembeli yang melanggar penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian jual beli adalah dapat diajukan gugatan berisikan tuntutan pembayaran ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdara. Pelanggaran terhadap asas *pacta sunt servanda* tersebut dapat berupa terjadinya bentuk-bentuk wanprestasi seperti dipenuhinya prestasi akan tetapi tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Pelanggaran oleh konsumen terhadap asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian jual beli dapat mengakibatkan kerugian terhadap pelaku usaha, seperti memperlambat *cashflow* dan dapat menghilangkan profit yang menjadi tujuan pelaku usaha.
2. Perlindungan hukum terhadap penjual dalam perjanjian jual beli diatur melalui ketentuan hak-hak bagi pelaku usaha dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apabila terjadi pelanggaran asas *pacta sunt servanda* oleh pihak pembeli maka dapat dikenakan tuntutan ganti rugi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, sedangkan bentuk ganti ruginya diatur dalam ketentuan Pasal 1246 KUHPerdara.

Acknowledge

Penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Peneliti terutama mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Sri Ratna Suminar, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing atas komitmennya dalam mngarahkan dan memberikan masukan yang membangun. Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada pihak narasumber atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selain itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah dengan tulus mendoakan dan mendukung demi kelancaran penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum.

Daftar Pustaka

- [1] Abdulkadir Muhammad. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti; 2000.
- [2] Ahmadi Miru. Hukum Kontrak Perancangan Kontrak. Jakarta: Raja Grafindo Persada; 2007.
- [3] Handri Rahardjo. Hukum Perjanjian Indonesia. Jakarta: Pustaka Yustisia; 2009.
- [4] Hardijan Rusli. Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan; 1993.
- [5] Johannes Gunawan. Kajian Ilmu Hukum Tentang Kebebasan Berkontrak: Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum. Bandung: Refika Aditama; 2011.
- [6] Mariam Darus Badruzaman. Asas-Asas Perjanjian. Bandung: Sumur; 1960.
- [7] R. Setiawan. Pokok-pokok Hukum Perikatan. Bandung: Bina Cipta; 2007.
- [8] Rachmanto Hadi. Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Hukum Perjanjian Secara Teori dan Praktek. Surabaya: Mitra Ilmu; 2011.
- [9] Sutan Remi Sjahdeni. Kebebasan Bebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti; 2009.
- [10] Wirjono Projodikoro. Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu. Bandung: Sumur; 1991.
- [11] Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup; 2013.
- [12] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- [13] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen